

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat tujuan pembangunan nasional yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Salah satu upaya yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pembangunan ekonomi yang merata dan berkesinambungan diseluruh daerah di Indonesia.

Pembangunan daerah adalah suatu proses pembangunan dimana pemerintahan daerah telah membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004). Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan di daerah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2011). Peningkatan produktivitas di suatu wilayah mengidentifikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan tersebut akan menaikkan kapasitas penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat (Todaro, 2011).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut dari tahun ke tahun. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang di hasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai PDRB menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada (BPS, 2019). Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun di suatu daerah dapat diukur berdasarkan PDRB konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Arifin, 2009).

Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi daerah yang berada di lintas batas ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Indikator makro ekonomi pada tahun 2007-2021 menunjukkan bahwa data PDRB pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif atau tidak tetap. Salah satu masalah yang di hadapi oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah pengetahuan dan pemahaman akan potensi yang di miliki daerah tersebut dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

**Tabel 1.1**  
**PDRB atas dasar harga konstan dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**di Kabupaten Timor Tengah Utara**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Rp.000)</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi %</b>
2007	442.916.897	4,45
2008	454.532.685	5,29
2009	476.874.750	4,51
2010	496.744.490	4,65
2011	516.751.860	4,76
2012	563.984.580	4,92
2013	585.610.860	4,52
2014	276.893.680	4,58
2015	432.654.650	4,7
2016	502.761.993	4,8
2017	626.963.164	5,01
2018	752.978.198	5,03
2019	528.984.540	5,1
2020	582.907.790	1,59
2021	492.937.642	2,31

*Sumber : BPS kabupaten Timor Tengah Utara, 2021*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami fluktuatif dari tahun 2007-2021. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,45%, meningkat pada tahun 2008 sebesar 5,29%. Dan pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 4,51% tetapi pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 4,65% dan terus meningkat pada tahun 2011 sebesar 4,79% hingga tahun 2012 sebesar 4,95%. Pada tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52%. Pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun ke tahun yaitu tahun 2014 sebesar 4,58 %, tahun 2015 sebesar 4,70 %, tahun 2016 sebesar 4,80 %, tahun 2017

sebesar 5,01 %, tahun 2018 sebesar 5,03 % dan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dicapai pada tahun 2019 yakni mencapai 5,10 %. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 1,59 % di akibatkan karena adanya Virus Corona (Covid-19) yang menyebar di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yakni 2,31 %. Pertumbuhan Ekonomi yang fluktuatif ini diduga disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja daerah yang juga mengalami fluktuasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Era Otonomi Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tapi benar-benar mempunyai kekuasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasang. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.

Menurut Baskara et al. 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, jika pendapatan daerah tinggi maka semakin tinggi pula kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Derisa, 2009). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, inti dari maksud Desentralisasi Fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (7) dari Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Dukungan sumber-sumber keuangan yang berhasil dari PAD terdiri dari: (a). Hasil Pajak Daerah; (b). Hasil Retribusi Daerah; (c). Hasil Perusahaan Milik Daerah; (d). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (e). Dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan strategi yang baik dengan tetap melihat potensi yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni dengan mengupayakan perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah sebab berlandaskan pada perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah akan ditentukan terget Pendapatan Asli Daerah pada periode selanjutnya secara Akurat.

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007-2021**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)
1	2007	63.853.769.000	4,45
2	2008	65.763.990.000	4,41
3	2009	68.876.961.000	5,29
4	2010	73.819.982.000	4,65
5	2011	76.935.783.000	4,76
6	2012	58.986.845.000	4,95
7	2013	69.987.749.000	5,18
8	2014	55.692.860.000	78,07
9	2015	63.782.781.000	12,82
10	2016	76.828.950.000	98,83
11	2017	79.795.860.000	8,26
12	2018	69.890.624.000	32,28
13	2019	67.692.873.000	12,41
14	2020	64.762.721.000	4,44
15	2021	69.939.683.000	20,27

*Sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, 2021*

Tabel 1.2 menunjukkan nilai Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan selama periode 2007-2021. Akan tetapi nilai pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2007 pertumbuhan PAD sebesar 4,45 %, menurun sebesar 4,41 % pada tahun 2008, dan meningkat pada tahun 2009 sebesar 5,29 %. Pada tahun 2010 pertumbuhan PAD menurun sebesar 4,65 %, meningkat secara terus menerus pada tahun 2011 sebesar 4,76 % dan pada tahun 2012 sebesar 4,95 %. Kemudian pertumbuhan PAD pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,18 %, mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 78,07 %, kemudian mengalami

penurunan sebesar 12,82 %, pada tahun 2015, dan pertumbuhan PAD yang paling tinggi dicapai pada tahun 2016 yakni mencapai 98,83 %. Pada tahun 2017 pertumbuhan PAD mengalami penurunan hingga 8,26 % dan terus menurun pada tahun 2018 hingga mencapai 32,28 %. Namun kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 12,41 %, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 4,44 % namun meningkat pada tahun 2021 yakni mencapai 20,27 %. Pertumbuhan Pendapatan asli daerah yang fluktuatif ini diduga disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah yang juga mengalami fluktuatif.

Adapun Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Berdasarkan Undang-undang No 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 14, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan salah satu komponen dalam pemerintahan agregat (*Aggregate Demand*), sebab apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan agregat akan meningkat (Mankiw, 2007). Dengan demikian semakin besar belanja daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap pertumbuhan Ekonomi (Darise, 2006). Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara dinilai belum terlalu efisien, hal ini dikarenakan jumlah belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara masih terlalu tinggi sehingga untuk pembangunan juga belum terlalu memadai di daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

**Tabel 1.3**  
**Pengeluaran Belanja Daerah**  
**Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007-2021**

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Miliar Rupiah)	BelanjaLangsung (MiliarRupiah)	Jumlah (Miliar Rupiah)
2007	280.040.120	392.808.850	672.848.970
2008	394.525.102	286.448.784	680.973.868
2009	485.339.999	479.655.995	964.995.994
2010	517.704.748	379.087.044	896.791.791
2011	406.868.955	392.804.897	799.673.852
2012	477.082.514	419.704.467	896.786.975
2013	497.215.789	401.470.061	898.685.859
2014	418.355.433	435.436.531	853.791.964
2015	563.455.685	426.409.108	989.864.793
2016	577.751.167	402.044.803	979.795.970
2017	572.714.350	392.153.349	964.867.699
2018	594.812.858	400.942.123	995.794.981
2019	998.987.638	896.866.033	1.893.853.671
2020	973.592.876	612.273.107	1.585.865.983
2021	676.077.166	311.813.799	987.890.965

**Sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, 2021**

Seiring dengan kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan Pengeluaran Belanja Daerah secara efektif dan efisien. Jumlah Pengeluaran Belanja Daerah pada tahun 2007 sebesar Rp 672.848.970, meningkat pada tahun 2008 sebesar Rp 680.973.868, dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar Rp 964.995.994. Pada tahun 2010 menurun sebesar Rp 896.791.791, pada tahun 2011 mengalami menurun sebesar Rp 799.673.852, dan meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp 896.786.975. Pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp 898.685.859, tahun 2014 menurun sebesar Rp 853.791.964 dan pengeluaran daerah meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp 989.864.793, pada tahun 2016 menurun sebesar Rp



979.795.970, pada tahun 2017 menurun sebesar Rp 964.867.699, pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp 995.794.981, tahun 2019 sebesar Rp 1.893.853.671, dan peningkatan terbesar di alami pada tahun 2020 menurun sebesar Rp 1.585.865.983 ini diakibatkan karena adanya covid. Pada tahun 2021 pengeluaran daerah mengalami penurun sebesar Rp 987.890.965.

Dalam Pendapatan Asli Daerah, pengeluaran Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara, penerimaan dan pengeluaran daerah belum terlalu efisiensi. Dimana belanja daerah masih terlalu tinggi dibandingkan pendapatan daerah yang di dapatkan oleh pemerintah, hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonominya tidak stabil atau fluktuatif Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara?

4. Apakah pendapatan asli daerah dan belanja daerah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Timor Tengah Utara.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui gambaran pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Mengetahui pengaruh belanja daerah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara.
4. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah dan instansi daerah agar dapat memberikan informasi yang berguna dalam mengelola pendapatan asli daerah dan pengeluaran belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam mengambil kebijakan untuk mengatur perekonomian.
2. Bagi akademik sebagai informasi dan gambaran yang bermanfaat tentang bagaimana pengaruh pendapatan asli dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi bagi peneliti berikutnya.
3. Bagi penulis sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

4. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi peneliti lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
5. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.